

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Ketimpangan Wilayah

Adanya perbedaan kemajuan antar wilayah berarti adanya ketidaksamaan kemampuan untuk tumbuh atau dengan artian adanya kesenjangan sehingga timbul ketidakmerataan. Hal ini memunculkan berbagai pendapat dan studi-studi bersifat empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang saling berhubungan. Kuznet (1995) dalam hipotesis yang dikenal sebagai *U Hypothesis*, mengatakan bahwa ada pola *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan kemajuan pembangunan ekonomi pada saat mencapai tahap tertentu *trade off* akan tergantikan dengan kolerasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan yang disebabkan pertumbuhan pada yang tahap awal pembangunan yang cenderung hanya ke arah sektor modern saja.

Kesenjangan yang disebabkan oleh tidak seimbangnya antar sektor modern dan sektor tradisional ini memperbesar jarak ketimpangan. Peningkatan sektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Berdasarkan tingkat kemajuannya wilayah-wilayah dalam suatu negara dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Wilayah maju : kota-kota besar dimana terdapat batas pertumbuhan atau polarisasi. Wilayah ini biasanya menghadapi masalah *diseconomics scale*, seperti kenaikan gaji dan upah, kenaikan harga baku dan lain-lain.
- b. Wilayah netral : wilayah dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, tidak ada kesesakan dan tekanan ongkos sosial dan merupakan kota satelit bagi wilayah yang terlalu padat.
- c. Wilayah sedang : wilayah dengan campuran pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik. Namun juga memiliki pengangguran dan masyarakat miskin.
- d. Wilayah kurang berkembang : wilayah dengan tingkat pertumbuhan jauh dibawah tingkat pertumbuhan nasional dan tidak ada tanda pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi.
- e. Wilayah tidak berkembang : wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan tidak ada kemajuan dimana industri modern tidak dapat berkembang. Pertanian tumbuh dengan skala kecil, penduduk tersebar, dan konsentrasi kota yang rendah (Siagian, 2010)

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa macam ketimpangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan,

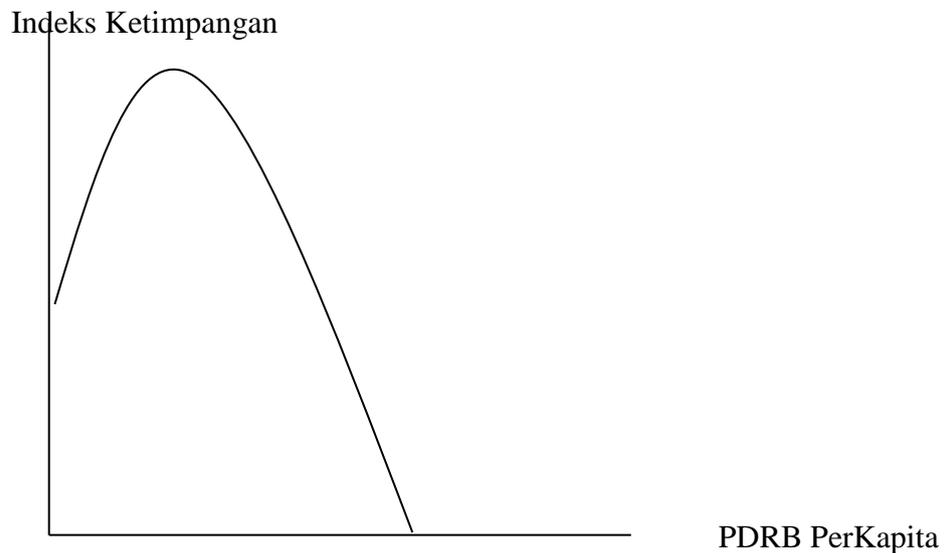
yaitu: ketimpangan antar daerah, ketimpangan antar sektor, dan . ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat (Basri, 1995).

Menurut Kuncoro (2003) seringkali ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Menurut World Bank (1990), antara pertumbuhan dan kemiskinan bukanlah suatu *trade-off* yang tidak dapat diatasi. Dengan kebijakan yang tepat, golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan, dan jika mereka dapat melaksanakan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan akan konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Terdapat berbagai tipe pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Penelitian dengan data silang tempat oleh Kuznetz (1955), diakui sebagai pelopor penelitian komparatif dalam distribusi pendapatan. Penelitian empiris Kuznetz mensintesisikan adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*), yaitu pada awal ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata, seperti yang ditunjukkan pada kurva berikut:

Grafik 2.1

KURVA “U” TERBALIK (Hipotesis Kuznetz)



Sumber : Todaro, 2000

Pada Hipotesis Neo-Klasik diuji kebenarannya melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang.

Menurut Hirschman (1970) dan Jingham (1990) terdapat 2 teori ketimpangan (*disparity*) wilayah, yaitu *Trickling Down Effect* dan *Polarization Effect*; dan *Spread Effect and Backwash Effect*

a. *Trickling Down Effect* dan *Polarization Effect*

Hirschman , Albert O (1970) Membedakan daerah di suatu negara menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Dimana jika ada perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik atau disebut *Trickling Down Effect*. Sedangkan jika perbedaan antara daerah kaya dan daerah

miskin itu melebar maka terjadi imbas yang kurang baik atau terjadi proses pengkutuban atau *Polarization Effect*.

b. *Spread Effect and Backwash Effect*

Jinghan (1990) menyatakan bahwa ketimpangan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non ekonomi. Ketimpangan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif inilah yang mendorong pembangunan hanya terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki angka ekspektasi laba yang lebih tinggi, sedangkan wilayah lain akan ditinggalkan.

Pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak balik atau *backwash effect*. Misalnya jika terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah A maka akan mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya baik tenaga kerja maupun modal dari wilayah di sekitarnya sehingga wilayah A yang sejak lebih maju karena pertumbuhan ekonominya akan semakin maju sedangkan wilayah lain akan semakin tertinggal. Sedangkan *spread effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pula di wilayah lain, misalnya suatu wilayah merupakan wilayah industri modern sedangkan wilayah lain merupakan wilayah produksi bahan mentah. Maka kedua wilayah akan saling berhubungan, jika

wilayah industri mengalami pertumbuhan maka wilayah bahan mentah akan terkena dampak dan mengalami pertumbuhan pula. Selanjutnya ketimpangan yang terjadi antar wilayah menunjukkan kurangnya dampak dari *spread effect* sebaliknya yang terjadi adalah kuatnya dampak balik atau *backwash effect* (Siagian, 2010).

Pengukuran ketimpangan (*disparity*) memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Beberapa metode pengukuran yang sering digunakan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Indeks Williamson

Indeks Williamson mengukur disparitas dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata-rata pendapatan nasional.

Rumus Indeks Williamson adalah (Syafrizal,2012) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}}{Y}$$

Keterangan

Y_i = PDRB per Kapita di Provinsi

Y = PDRB per Kapita rata-rata Nasional

f_i = Jumlah penduduk di Provinsi

n = Jumlah Penduduk Nasional

b. Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil ini dapat digunakan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi theil juga dapat digunakan untuk menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama kurun waktu tertentu dan mengkaji gambaran lebih rinci tentang ketimpangan spasial. Sebagai contoh ketimpangan antar wilayah dalam suatu Negara (Kuncoro, 2004). Rumus Indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004) :

$$I = \sum \left(\frac{y_j}{Y} \right) \times \log \left[\frac{\left(\frac{y_j}{Y} \right)}{\frac{x_j}{X}} \right]$$

Keterangan :

I(y) = Indeks Entropi Theil

y_j = PDRB per kapita Kabupaten/Kota j

Y = rata-rata PDRB per kapita Provinsi

x_j = jumlah penduduk Kabupaten/Kota j

X = jumlah penduduk Provinsi

c. Indeks Jaime Bonet

Indeks ini merupakan pengukuran oleh Bonet (2006) untuk mengukur ketimpangan wilayah sebagai variabel dependen dalam penelitiannya untuk menghitung pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Negara Kolumbia.

Indeks Bonet pada Provinsi untuk periode t ($IB_{i,t}$) dirumuskan sebagai berikut (Siagian, 2010) :

$$IB_{i,t} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right|$$

Keterangan :

IB = ketimpangan Provinsi i pada tahun t

$PCGDP_{i,t}$ = PDRB per kapita kabupaten/kota i, pada tahun t

$PCGDP_{NAL,t}$ = PDRB per kapita Provinsi pada tahun t

2. Teori Desentralisasi Fiskal

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini (2006) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi,

baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Sasana, 2009).

Menurut Menteri Keuangan No. 224 / PMK.07 tahun 2008 komponen-komponen desentralisasi fiskal Penerimaan terdiri dari : PAD, DAU, DBH.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan

dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2009)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan 10 dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Widjaja, 1992).

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2006) bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Namun apabila eksploitasi PAD dilakukan secara berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2009).

PAD terdiri dari beberapa jenis, beberapa jenis-jenis tersebut menopang Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bagian-bagian dari PAD diantaranya yaitu:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang telah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dibedakan dalam dua jenis atau kategori diantaranya pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah di antara lain adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan lain-lain.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh daerah sehubungan adanya suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah yang secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah diantaranya adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukan penggunaan

tanak, izin trayek dan sebagainya. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah; retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berupa hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana bagian tersebut terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik

daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah (BPS, 2014).

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1) Dana Bagi Hasil

a) Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh), dan (BPS, 2014)

b) Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IPHP), provisi sumber daya hutan

(PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/ eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam (BPS, 2014)

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah satu dengan daerah lain dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat (BPS, 2014). Sebagai dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, DAU merupakan salah satu transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat (Hamid, 2005).

Jumlah Transfer dana yang tinggi dari pusat berupa DAU memiliki beberapa kelemahan bagi daerah diantaranya menyebabkan masih tingginya ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah pada dana dari pusat untuk belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Susilo dan Adi (2007) menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak membaik,

bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Ketergantungan keuangan ini antara lain dapat dilihat pada anggaran pemerintah daerah yang komponen sumbangan dan bantuan dari pusat sangat tinggi, melampaui Pendapatan Asli Daerah (Hamid, 2005).

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada 3 kriteria dalam kebutuhan khusus yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- b) Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- c) Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan syarat diatas DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan (BPS, 2014).

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, prinsip dana harus sesuai dengan fungsi penggunaan (*rules money should follow function*) merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan

dilaksanakan (Bahl, 2000). Jadi, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

Sementara dari segi Desentralisasi Pengeluaran, pemerintah daerah membagi menjadi tiga yaitu Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah. Berikut rincian dalam sisi realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Provinsi.

1) Belanja pegawai tidak langsung adalah belanja yang merupakan kompoensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan,

serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipi di lingkungan pemerintahan Provinsi maupun daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Termasuk didalamnya adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD (Kuncoro, 2004)

- 2) Belanja bunga adalah belanja guna untuk pembayaran utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang dan berdasarkan jangka waktu perjanjian.
- 3) Belanja subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan dalam bentuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan ataupun lembaga tertentu, dimaksudkan untuk menurunkan harga barang hasil produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum secara luas.
- 4) Belanja hibah adalah belanja yang dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, maupun pemerintah desa.
- 5) Belanja bantuan sosial adalah belanja yang dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, atau organisasi lain guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah belanja yang dianggarkan sebagai

dana bagi hasil dari pendapatan Provinsi kepada kabupaten/kota atau desa. Belanja ini terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi (BPS, 2014)

b. Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung pada periode waktu 1 tahun provinsi

- 1) Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honor atau upah untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintah daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pemerintah guna pengadaan barang nilai dan manfaatnya kurang dari satu tahun, misalnya barang-barang habis pakai dalam kantor, sewa mobilitas maupun kebutuhan pemerintah habis pakai lain.
- 3) Belanja modal adalah pengeluaran guna untuk pengadaan atau aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, misalnya pengadaan tanah, fasilitas kesehatan, komputer, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, listrik, penerangan jalan, tata kota dan lain-lain.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, dan sebaliknya hasil surplus anggaran harus dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik dalam pembayaran hutang pokok, maupun untuk investasi dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada pengeluaran pembiayaan daerah didalamnya termasuk transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Bahl mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami

benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991) :

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai; Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*). Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*). Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa

keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Bahl (2001) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah ini secara teori dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak positif pajak (*local tax rate*) dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa *tax revenue* akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik. Sebaliknya, dampak negatif pajak bagi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan karena pajak menimbulkan

“deadweight loss of tax”. Ketika pajak dikenakan pada barang, maka pajak akan mengurangi surplus konsumen dan produsen.

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganeekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

3. Teori Inflasi

Inflasi adalah kondisi dimana kenaikan harga terjadi secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Kenaikan harga umum yang terjadi secara terus menerus dalam suatu periode inilah yang dapat menyebabkan inflasi (Boediono, 2010)

Inflasi dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, baik alokasi faktor produksi maupun produk nasional. Efek inflasi terhadap distribusi pendapatan ini disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek inflasi terhadap alokasi faktor produksi disebut dengan *efficiency effect* dan efek inflasi terhadap pendapatan nasional disebut dengan *output effects* (Nopirin, 2000)

Efek terhadap Pendapatan (*Equity Effect*) memiliki sifat yang tidak merata, memiliki efek merugikan namun ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Dalam hal ini misalnya, jika individu menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas, inflasi ini akan merugikan individu tersebut. Lain halnya dengan pihak yang mendapat keuntungan dengan kenaikan pendapatan karena kenaikan persentase kenaikan inflasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa inflasi dapat menyebabkan perubahan pola distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat dalam bentuk tertentu.

Di dalam efek inflasi terhadap efisiensi, inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan bisa dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam kenaikan permintaan barang atau jasa yang kemudian akan mendorong jumlah produksi. Kenaikan jumlah produksi barang tertentu akan menimbulkan efek domino dimana barang lain juga akan mengalami kenaikan permintaan dan akan menyebabkan kenaikan produksi pula.

Setelah inflasi mempengaruhi kenaikan produksi, selanjutnya kenaikan produksi juga akan mendorong kenaikan upah yang sebelumnya diakibatkan oleh kenaikan keuntungan perusahaan. Kenaikan keuntungan juga akan mendorong kenaikan produksi. Selama produksi masih dalam angka wajar dan tidak akan menyebabkan laju inflasi cukup tinggi jika inflasi terlalu tinggi maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu penurunan output.

Dalam keadaan inflasi yang tinggi, otomatis nilai uang riil akan turun, uang kas cenderung mulai langka, menyebabkan turunya produksi barang. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara inflasi dengan output tidak secara langsung berinteraksi. Inflasi bisa terjadi bersamaan dengan kenaikan output namun juga bisa bersamaan dengan penurunan output.

4. Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 1 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Secara analisis ketenagakerjaan, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu golongan tenaga kerja dan golongan bukan tenaga kerja. Golongan tenaga kerja adalah penduduk yang berada di usia kerja sedangkan golongan bukan tenaga kerja adalah penduduk yang tidak berada dalam usia kerja.

Tenaga kerja yang terserap kedalam dunia kerja dan mampu menghasilkan pendapatan adalah mencerminkan penyerapan tenaga kerja. Tersebar nya penduduk yang bekerja dikarenakan oleh adanya permintaan tenaga kerja di dalam pasar tenaga kerja. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, hal ini menandakan bahwa sumber daya manusia yang besar pula. Jumlah tenaga kerja yang besar ini harus dimanfaatkan untuk pengembangan dan perkembangan ekonomi.

Distribusi penduduk di suatu wilayah menandakan bahwa wilayah tersebut telah menunjukkan kemandirian secara sumber daya manusia (Boediono, 2010). Dalam perekonomian peran penduduk sangat penting, dimana tenaga kerja atau bagian dari penduduk adalah salah satu sumber kemandirian ekonomi. Jika tenaga kerja yang ada memiliki keterampilan yang memadai dan telah tersebar kedalam sektor-sektor tertentu dengan baik, kemampuan perekonomian tersebut akan otomatis meningkat. Seiring meningkatnya kemampuan perekonomian tenaga kerja, tingkat kemandirian suatu wilayah juga akan meningkat (Todaro, 2006).

Selain distribusi tenaga kerja yang tersebar dengan jumlah besar pada kota-kota besar distribusi pendapatan tenaga kerja juga berpengaruh pada ketimpangan wilayah. Sebagai contoh, tenaga kerja dengan kualitas rendah dan jumlah banyak akan berdampak positif pada ketimpangan karena distribusi pendapatan yang rendah.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan antara Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan

Wilayah

Menurut Gunar Mirdal dalam Roy (2013) ketimpangan wilayah antar daerah disebabkan oleh pengaruh *backwash effect* yang lebih besar dari *spread effect*. Adanya perbedaan infrastruktur antara daerah kaya dan daerah miskin menimbulkan perbedaan pelayanan publik dan menyebabkan meningkatnya perpindahan tenaga kerja maupun migrasi dari satu daerah ke daerah lain. Hal tersebut lah yang menimbulkan *backwash effect*, sementara terjadinya *spread effect* terjadi atas adanya peningkatan *market share* sebagai akibat dari peningkatan produksi dari sektor tertentu yang mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju. (Juliansyah, 2013)

Sementara MacKinnon (1995) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah suatu alat menjaga komitmen dan pernyataan bahwa ketimpangan regional berkaitan dengan efisiensi pelayanan publik, dampak kebijakan yang insentif dari desentralisasi di pemerintah daerah. Anggaran yang terdesentralisasi memberi kebijakan menutupi pembiayaan daerah yang kurang mampu dengan cara pembagian sumber daya dari pemerintah pusat relatif melemahkan anggaran dan mengganggu insentif daerah untuk keluar dari golongan daerah miskin, sehingga desentralisasi memiliki kemungkinan mengurangi ketimpangan antar daerah. Sementara itu menurut Wiliamson

(Juliansyah, 2013) disparitas antar wilayah cenderung semakin membesar pada tahapan awal proses pembangunan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan disparitas antar wilayah, diantaranya :

- a. Perpindahan penduduk usia produktif dari daerah yang belum berkembang ke daerah yang sudah berkembang karena akan mendapat gaji/upah yang lebih tinggi.
- b. Mayoritas investasi dilakukan didaerah yang sudah berkembang karena pertimbangan pasar yang memiliki keuntungan relatif lebih besar, sebaliknya resiko kerugian aliran modal dari daerah berkembang menuju daerah miskin.
- c. Kebijakan pemerintah yang cenderung terkonsentrasi pada fasilitas sarana dan prasarana kegiatan ekonomi sosial di daerah yang sudah berkembang karena kebutuhan masyarakatnya yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang belum berkembang.
- d. Kegiatan ekonomi terutama perdagangan dan pola perdagangan juga terpusat di daerah yang sudah berkembang.

Dalam penelitian Hartono (2009) tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah ditemukan bahwa alokasi dana pembangunan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat penelitian lain yang langsung meneliti

tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan wilayah, terdapat penelitian Miyasto (2013) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan wilayah, yang artinya desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dengan kondisi pada tahap awal pembangunan namun seiring berjalannya waktu pada tahap tertentu ketimpangan akan menurun (Apriesta, 2013). Dijelaskan secara lebih lanjut, dalam sistem sentralistis terdapat pelaksanaan distribusi sumber daya daerah yang kaya ke daerah yang miskin dan hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan, namun dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak berarti dampak kesenjangan akan lebih tinggi, dalam sistem ini melalui otonomi daerah mampu memajukan daerah dengan cara pembangunan yang lebih insentif dengan melakukan berbagai kebijakan yang secara langsung dapat mendukung pembangunan di daerah tersebut.

Dalam penelitian Rosdyana (2015) yang memiliki tema hampir sama dengan penelitian ini menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah, dalam artian meningkatnya derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan angka ketimpangan pendapatan, tetapi secara tidak signifikan (Dewi Rosdyana, 2015). Berdasarkan ulasan teori dan pendapat empiris diatas dapat disimpulkan bahwa terlepas pola pemerintahan angka ketimpangan akan turun dengan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu tertentu,

dengan penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, setiap daerah memiliki fokus yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pembangunan perekonomiannya. Terdapat faktor karakteristik ekonomi, masyarakat dan kelembagaan dalam setiap masing-masing daerah. Faktor-faktor tersebut yang menjadi pengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi pada umumnya maupun ketimpangan wilayah khususnya.

Menurut Prud'homme (1995) desentralisasi pendapatan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan regional, menurutnya wilayah yang lebih berkembang akan memiliki *tax bases* yang lebih tinggi, maka akan lebih mudah untuk mengumpulkan pajak dengan jumlah yang lebih besar. Dengan pajak besar maka daerah tersebut memiliki penghasilan yang tinggi untuk membengun pelayanan publik yang lebih baik dibanding dengan daerah yang belum berkembang, mengakibatkan para pelaku ekonomi juga akan lebih memilih untuk berpindah ke daerah yang sudah memiliki pelayanan publik lebih baik, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya disparitas regional. Hal senada diutarakan dalam penelitian Putri (2015) bahwa PAD yang semakin besar dan merata akan mendorong adanya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi yang namun juga akan meningkatkan tingkat ketimpangan regional.

Hal sebaliknya diutarakan oleh (Widhiyanto, 2008) bahwa PAD atau *Local Revenue* berkolerasi negatif secara signifikan terhadap disparitas regional. Dalam artian bahwa terdapat perbedaan pendapat

oleh peneliti sebelumnya tentang pengaruh PAD dengan Ketimpangan wilayah, dimana pendapat pertama menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara PAD yang meningkat akan meningkatkan ketimpangan wilayah, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa PAD yang meningkat justru akan menurunkan angka ketimpangan wilayah.

2. Hubungan antara Pengeluaran Belanja Pemerintah dengan Ketimpangan

Desentralisasi memiliki tujuan awal untuk membuat pemerintah lebih dekat dengan rakyat, maka dari itu diharapkan pemerintah akan mengetahui lebih baik kebutuhan masyarakat dan membuat kebijakan dalam rangka kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam mekanisme desentralisasi ini, maka diharapkan akan membawa hal positif dalam kinerja ekonomi daerah yang baik dan pemerataan ekonomi rakyat (Djoni Hartono, 2008).

Pengeluaran pemerintah yang berupa belanja pemerintah terbagi menjadi menjadi 2 bagian, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sebagai sektor output anggaran pemerintah daerah belanja-pemerintah selalu menjadi sorotan karena memiliki hubungan erat keberlangsungan pemerintahan daerah. Beberapa yang menjadi alasan mengapa pemerintah harus memiliki anggaran belanja yang tinggi karena untuk keberlangsungan pemerintah yang baik, pemerintah mengharapkan bahwa pemerintahan akan berjalan lebih baik dengan

pemenuhan kebutuhan baik sarana prasarana, infastruktur maupun jasa pelayanan masyarakat.

Dalam penelitian (Lessman, 2009) ditemukan bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara signifikan berkorelasi negatif terhadap ketimpangan regional. Pada penelitian (Toatubun, 2011) yang melakukan penelitian tentang disparitas pembangunan di Provinsi Maluku, bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan di Provinsi Maluku.

3. Hubungan antara Inflasi dengan Ketimpangan

Menurut penelitian (Sasetya, 2005) inflasi memiliki hubungan kausalitas satu arah dengan distribusi pendapatan yang dimana akan mengakibatkan ketimpangan yang ditunjukkan pada indeks gini. Sementara dalam penelitian lain belum ditemukan pengaruh signifikan langsung antara inflasi dengan ketimpangan pendapatan.

4. Hubungan antara tenaga kerja dengan Ketimpangan

Menurut penelitian (Rosdyana, 2015) tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini bertentangan dengan teori fungsi produksi Neo-klasik yang dimana tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan produksi dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja mempengaruhi produksi. Dalam kondisi tersebut marginal produksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, jika jumlah tenaga kerja terus ditambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal,

maka pendapatan perkapita akan meningkat. Jika pendapatan per kapita meningkat maka akan mendorong penurunan tingkat ketimpangan antar wilayah karena secara bertahap tingkat pendapatan wilayah juga akan merata dengan asumsi *full employment* (Sukirno, 2011).

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan dijadikan oleh penulis sebagai bahan acuan dalam menyusun penelitian ini. Berikut daftar penelitian terdahulu :

TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Y. Simonsen Sianturi dan Prof. Dr. H. Miyasto, SU (2009)	“Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara)”	Variabel independen : Desentralisasi Fiskal, Tenaga kerja, Pajak Daerah, dan Aglomerasi. Variabel dependen : pertumbuhan ekonomi, perkembangan ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan wilayah	Regresi persamaan simultan (<i>simultaneous equation regression model</i>) dengan model berulang (<i>Recursive Models</i>) dan kuadran terkecil. Model diregresimenggunakan metode OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) dengan data panel atau PLS (<i>Panel Least Square</i>)	Hasil penelitian diperoleh (1)Peningkatan derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dari penerimaan daerah signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 19 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. (2) Rasio Pajak daerah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (3)Jumlah tenaga kerja signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (4) Aglomerasi signifikan dan memiliki pengaruh positif

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					<p>terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>(5) Pertumbuhan ekonomi daerah signifikan dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah pada 19 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. (6) Derajat desentralisasi fiskal signifikan mempengaruhi secara positif ketimpangan wilayah pada 19 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.</p>
2.	Altito R Siagian (2010)	“Dampak Desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)”	Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah	Analisis Kualitatif dan Kuantitatif (Regresi OLS Panel atau PLS <i>(panel Least Square</i>	Pertumbuhan ekonomi signifikan dan positif dipengaruhi oleh derajat desentralisasi fiskal, dan tingkat aglomerasi suatu daerah tersebut. sebaliknya pajak daerah dan tenaga kerja signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
.			Variabel Independen : Desentralisasi Fiskal, Tenaga Kerja, Pajak Daerah, dan Aglomerasi.		Ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan ketimpangan wilayah. Dana kedua adalah desentralisasi fiskal yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan wilayah
3.	Theresia Dyah Okta Raditya dan Ign. Agus Wantara (2013)	“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991-2012”	Variabel Dependen : Ketimpangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen : Desentralisasi Fiskal	TOLS (<i>Two Stage Least Square</i>)	Ketimpangan wilayah terjadi pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan indeks Entriphi Theil, hal dapat menyebabkan masalah yang serius jika tidak ditangani. Variabel derajat desentralisasi fiskal tidak

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah , variabel pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.
4.	Muhammad Andry Nurman (2013)	“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Regional di Indonesia Tahun 2001-2008	Variabel dependen : desentralisasi pengeluaran (belanja langsung) Variabel independen : PAD , DAU, dan Dana Bagi Hasil (desentralisasi penerimaan)	Metode OLS Panel	Belanja langsung mampu mengurangi disparitas pendapatan regional, sebaliknya DAU mengakibatkan meningkatnya disparitas pendapatan regional.

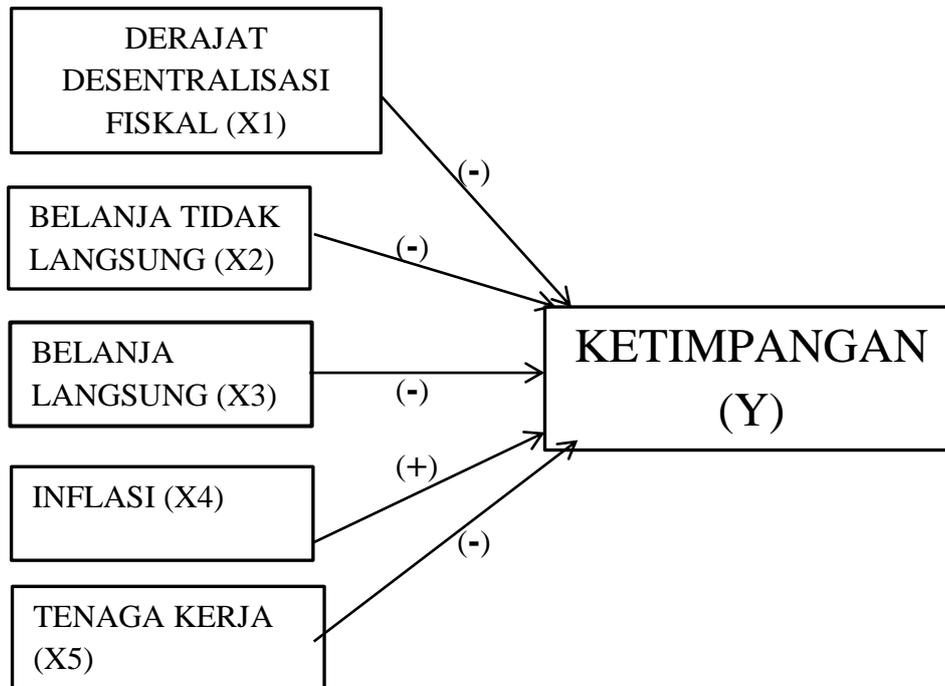
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
5.	Nurhemi dan Guruh Suryani R (2015)	“Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”.	Variabel independen: Belanja APBN, Kemiskinan, IPM dan derajat desentralisasi fiskal Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi	Analisis deskriptif dan metode data panel dengan GLS (<i>Generalized Least Square</i>). Model data panel statis (<i>Fixed Effect Model dan Random Effect Model</i>) dengan program Software STATA	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak konklusif untuk kasus desentralisasi di Indonesia.
6.	Dewi Rosdyana, E.Susy Suhendra, dan Rowland Bismark Fernando Pasaribu (2016)	“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2009-2013”	Variabel dependen : Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah Variabel independen : desentralisasi fiskal	Analisis regresi linier berganda SPSS	Desentralisasi fiskal di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
7.	Putri Puspita Sari (2016)	“Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Lampung”	Variabel Dependen : Disparitas Pendapatan Variabel Independen : Pendapata Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.	Metode analisis deskriptif dan asosiatif (Regresi OLS Panel atau PLS (<i>panel Least Square</i>)	PAD berpengaruh Positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Sebaliknya Dana Perimbang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan pada 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam sisi luas wilayah penelitian, sedangkan penelian ini berdasar pada metode penelitian-penelitian sebelumnya yaitu metode panel.

D. Kerangka Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ilmiah ini, paparan teori akan disusun dalam kerangka teoritis sebagai berikut :



Sumber : Kuncoro (2004)

GAMBAR 2-1
Kerangka Penelitian

Desentralisasi fiskal merupakan distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan lebih tinggi ke lebih rendah, dalam artian dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Desentralisasi adalah konsekuensi dari adanya kebijakan Otonomi daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah dijelaskan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, maka salah satu bentuk desentralisasi adalah Pendapatan

Asli Daerah (PAD). PAD digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi yang terjadi suatu daerah tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah bentuk desentralisasi fiskal pemerintah provinsi dalam sisi pengeluaran.

Dalam perkembangannya desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap ketimpangan daerah. Menurut Sacchi dan Salotti (2011) desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan antar daerah. Namun sebaliknya, menurut Kyriacou, Gallo dan Sagales (2013) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan antar daerah.

E. Hipotesis

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk beberapa hipotesis awal yang akan dibuktikan di dalam penelitian ini:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan
2. Belanja Tidak Langsung diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan
3. Belanja Langsung diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan
4. Inflasi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan

5. Tenaga kerja diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan